

REVITALISASI MODAL SOSIAL SEBAGAI UPAYA ADVOKASI KEBIJAKAN

LANSIA

(Studi Kasus di Lembaga FOPPERHAM Di Desa Kedungkeris Kecamatan Nglipar
Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta)



Oleh:

Saparwadi

NIM: 1620010045

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu
Kebijakan Publik Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Islam,
Pembangunan dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Saparwadi**
NIM : 1620010045
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 April 2019

Saya yang menyatakan,



Saparwadi

NIM. 1620010045

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Saparwadi**
NIM : 1620010045
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 April 2019

Saya yang menyatakan,


Saparwadi
NIM. 1620010045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

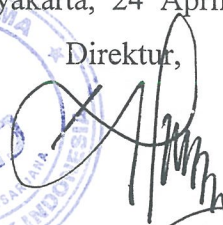
Tesis berjudul : REVITALISASI MODAL SOSIAL SEBAGAI UPAYA ADVOKASI
KEBIJAKAN LANSIA (Studi kasus Di Lembaga FOPPERHAM Di Desa
Kedungkeris Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta)

Nama : Saparwadi
NIM : 1620010045
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik
Tanggal Ujian : 5 April 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister of Art (MA.)

Yogyakarta, 24 April 2019

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : REVITALISASI MODAL SOSIAL SEBAGAI UPAYA ADVOKASI
KEBIJAKAN LANSIA (Studi kasus Di Lembaga FOPPERHAM Di Desa
Kedungkeris Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta)

Nama : Saparwadi

NIM : 1620010045

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Zulkipli Lessy, M.Ag., MSW., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Roma Ulinnuha, M.Hum.

Penguji : Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 April 2019

Waktu : 13.00 – 14.00 WIB.

Nilai Tesis : 90/A-

Predikat : ~~Dengan Pujian/Sangat Memuaskan~~/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan pembimbing, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul.

REVITALISASI MODAL SOSIAL SEBAGAI UPAYA ADVOKASI KEBIJAKAN LANSIA

(Studi Kasus di Lembaga FOPPERHAM Di Desa Kedungkeris Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta)

Yang ditulis oleh:

Nama : Saparwadi
Nim : 1620010045
Fakultas : Pascasarjana
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Kosentrasi : Islam, Pembangunan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Interdisciplinary Islamic Studies Fakultas pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Master Of Arts.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 April 2019

Pembimbing



Dr. Roma Ulinnuha., M.Hum.

NIP. 19740904 200604 1 002

MOTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*” (QS. Al-Hujarat 49 : 13)

“*Wahai manusia! Milikilah perhatian yang sama. Tumbuhkanlah saling pengertian di antara kamu. Dengan demikian engkau dapat mewujudkan kerukunan dan kesatuan*”. (Rgveda X.191.4)

ABSTRAK

Proses pembangunan tidak bisa kita pungkiri senantiasa akan menyisakan keterpinggiran. Ada kelompok-kelompok yang rentan mengalami keterpinggiran tersebut karena terhalang atau bahkan dihalangi aksesnya terhadap pembangunan. Kelompok tersebut diantaranya adalah lansia. Tesis ini berargumen bahwa, terdapat kecenderungan peningkatan kasus bunuh diri dengan rata-rata usia korban adalah warga lansia yang berhubungan erat dengan berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang menentukan. Apalagi jika melihat fakta bahwa proporsi penduduk yang memasuki usia lanjut semakin lama semakin signifikan jumlahnya di banyak negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi dan capaian lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkeris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul. Penelitian ini menggunakan kualitatif untuk mengemukakan kondisi serta keadaan di lapangan, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Kriteria pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* terdiri dari Pemerintah Desa Kedungkeris dan Relawan lansia Desa Kedungkeris, masyarakat lansia dan Stakeholder FOPPERHAM.

Menyadari bahwa masih banyaknya permasalahan lanjut usia di Kab. Gunung Kidul, FOPPERHAM berupaya melakukan Revitalisasi modal sosial sebagai upaya Advokasi kebijakan lansia untuk pemenuhan hak lansia di Desa Kedungkeris, Kec. Nglipar. Strategi revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi yang dilakukan berupa tahap perencanaan sosial, aksi sosial, peningkatan kesadaran dan pendidikan sosial. Adapun capaian dari revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia berupa terbentuknya Kerelawanan Lansia Desa Kedungkeris, Partisipasi Pemerintah Desa Kedungkeris Dalam Pembangunan Inklusif, Terbentuknya Lembaga Kesejahteraan Lansia (LKS) “RAHARJA” Desa Kedungkeris.

Kata Kunci: *Revitalisasi, Modal Sosial, Advokasi, Kebijakan, Lansia, Fopperham dan Desa Kedungkeris*

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda dedikasikan dengan penuh keistimewaan untuk ayahanda (Muhtar), Ibunda (Marnun), Bapak (Ir. H. Prijono Nugroho Ph.D) Kakak (Muliadi dan Nurmayana), Irma Suria Hidayati. serta Almamater Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam, Pembangunan Kebijakan Publik Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwr.wb.

Alhamdulillah, kami mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan seisialam di duniai ini, sehingga jadilah manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sholawat serta salam tidak terlupakan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, melalui beliau Allah mengirimkan malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, ilham serta mimpi bagi umat manusia. Dalam hal ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Tesis) sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister agama.

Penyusunan tesis dengan judul **“REVITALISASI MODAL SOSIAL SEBAGAI UPAYA ADVOKASI KEBIJAKAN LANSIA (Studi Kasus di Lembaga FOPPERHAM Di Desa Kedungkeris Kecamatan Ngelipar Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta)** ini selesai dikerjakan. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020.
2. Prof. Noorhaidi, M.A, M. Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ro'fah, S.Ag, BSW, MA, Ph.D selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
4. Dr. Roma Ulinuha M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis (DPT) yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran serta bimbingan sehingga penyusunan tesis ini terselesaikan dengan baik.

5. Dr. Suhadi, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah memberikan arahan dan nasihat selama saya menjadi mahasiswa Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Islam, Pembangunan Kebijakan Publik.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua saya, Bapak Muhtar, Ibunda Marnun dan Bapak Ir. H. Prijono Nugroho yang sudah memberikan do'a yang tiada hentinya serta dorongan baik berbentuk moril, materil, dan motivasi.
7. Kakak Nurmayana dan Muliadi kalian adalah saudara yang diberikan oleh Allah Swt. Untuk selalu menjadi bagian dari lingkaran kasih sayang buat diriku dan kedua orang tua kita.
8. Keluarga di Kampung Rancak Prai Meke, Lombok Tengah NTB.
9. Kepala Desa Kedungkeris dan jajarannya serta pihak terkait yang telah membantu saya dalam memperoleh data sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh Dosen dan TU Fakultas Pascasarjana Uin Sunan kalijaga, khususnya Dosen dan TU Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies.
11. M. Noor Romadlon Selaku Direktur Lembaga Fopperham terimakasih atas bantuannya dalam memperoleh data sehingga tesis ini dapat terselesaikan
12. Teman-teman Lembaga Fopperham (Mbk Tsabita, Mas Hendrik, Mbik diyah, Mbik Munti, mbk siti, dan Mbik susi) Terimakasih untuk kebersamaannya
13. Seluruh Relawan Lansia Desa Kendungkeris kecamatan Ngelipar Kabupaten Gunung Kidul terimakasih.
14. Seluruh teman-teman Remaja Ash-shiddiiqi (ustazd Rahmat, Lukman, Nuril, Ahmed, rudi, ocha, puji).
15. Teman-teman Kos Buk Vivit, rihan , basar, agus Buk Lisa, Ibu Vivit selaku pemilik kos, Basarudin,

16. Teman - teman IKADM dan IKPM TASTURA, Saparwadi, Suparman, Sudariah, Musanif, Habib, Ardian, Rizky, Subhan, Ustadz Mashur, Toby, Abdul Gafar, Eka Yudha, Edi Susanto, Siti Aminah, Siti Rahmi, Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu,
17. terkhusus untuk Irma Suria Hidayati yang telah bersedia meluangkan waktunya, memotivasi serta mengucapkan do'a dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga semua jasa dan kebaikan yang telah dilakukan menjadi amal sholih serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sendiri menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini tanpa ada bantuan dan dukungan dari kalian. Tanpa dukungan dari berbagai pihak di atas, tidak akan berarti apa-apa. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penyusun berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2019

Penulis,

SAPARWADI

NIM.1620010045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan.....	34

BABII DESKRIPSI LEMBAGA FOPPERHAM DAN MASYARAKAT DESA KEDUNGKRIS

A. Lembaga Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia....	37
B. Kondisi Sosial Desa Kedungkeris	42
C. Kondisi Ekonomi Desa Kedungkeris.....	44
D. Kondisi Lansia Desa Kedungkeris	45

BAB III STRATEGI FOPPERHAM DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN LANSIA DI DESA KEDUNGKRIS

A. Tahap Perencanaan sosial	50
B. AksiSosial.....	55

1. Adanya Pertemuan Rutin Lansia	56
2. Berkunjung Kerumah Lansia (<i>Home Visit</i>)	57
3. Pelayanan Kesehatan Terhadap Lansia.....	58
C. Peningkatan Kesadaran Dan Pendidikan Sosial.....	63
a. Pelatihan Dasar Keterampilan Mendengar dan Menulis	64
b. Workshop Desa Kedungkeris.....	65
BABVI CAPAIAN ADVOKASI KEBIJAKAN LANSIA DI DESA KEDUNGKRIS	
A. Gerakan Kerelawanan Lansia Desa Kedungkeris.....	70
B. Partisipasi Pemerintah Desa Kedungkeris	
Dalam Pembangunan Inklusif.....	73
C. Lembaga Kesejahteraan Lansia (LKS)	
“RAHARJA” Kedungkeris	78
BABV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penuaan penduduk kini sudah menjadi isu dunia. Di negara-negara sedang berkembang, isu ini memang belum terlalu banyak dibahas seperti di negara-negara maju. Namun, tidak berarti tidak penting untuk segera mulai di perbincangkan, karena isu ini berkaitan erat dengan berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang menentukan. Apalagi jika melihat fakta bahwa proporsi penduduk yang memasuki usia lanjut semakin lama semakin signifikan jumlahnya di banyak negara.¹

Beberapa negara di Asia bahkan kini tercatat sebagai suatu wilayah dengan penuaan penduduk yang paling cepat. Jepang, Korea Selatan dan Singapura adalah contoh negara yang mempunyai persentase penduduk lanjut usia yang cukup tinggi. Di Jepang, penduduk lanjut usia sudah mencapai lebih 30% dari total penduduk. Di Korea Selatan, 12, 7% dan di Singapura, 9%. Negara-negara ini juga sudah aktif membuat dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penuaan penduduk. Program-program pembangunan mereka selalu dikaitkan dengan isu-isu penuaan penduduk. Boleh dikatakan, penuaan penduduk merupakan suatu indikator dari keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial suatu negara.²

Beralih kedalam Negeri dalam angka absolutnya, jumlah penduduk lansia di Indonesia amat besar. Pada tahun 2010, jumlahnya adalah 18 juta

¹Roem Topatimasang, *Memanusikan Lanjut Usia: Penuaan Penduduk Dan Pembangunan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Survey Meter, 2013), 2-3.

²*Ibid.*

jiwa.³ Jumlah ini akan mencapai sekitar 30 juta jiwa pada tahun 2025, suatu kenaikan hampir 50% hanya dalam jangka waktu satu setengah dasawarsa. Bahkan, sampai 2030, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia akan menembus angka sekitar 40 juta jiwa, melampaui jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun pada masa yang sama.⁴ Jumlah penduduk lansia yang besar ini memerlukan kebutuhan dan perlakuan yang khusus. Hal itu sekaligus memperlihatkan bahwa isu penduduk lansia berkelindan dengan berbagai isu sosial ekonomi, politik, dan budaya, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan kawasan pedesaan, pelayanan sosial, bahkan juga perubahan pandangan dan gaya hidup pada penduduk kelompok usia yang lain.

Selanjutnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, memiliki persentase penduduk lansia tertinggi di antara semua daerah yang lain di Indonesia, mencapai 12,9%.⁵ Di antara 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, Kabupaten Gunung Kidul mencatat persentase penduduk lansia tertinggi, yakni 18,2%.⁶ Ketika merujuk ke kabupaten Gunung Kidul, ada dua permasalahan krusial yang patut menjadi perhatian kita bersama berkaitan dengan lanjut usia. *Pertama*, merujuk pemberitaan harian *Kedaulatan Rakyat*, 11 September 2017. Kasus bunuh diri di kabupaten Gunung Kidul tahun 2017 sampai dengan bulan September terdapat 29

³Proyeksi Penduduk Indonesia: *Indonesia Population Projection*, 2010-2030, (Jakarta, 2013), 25.

⁴*Ibid.*

⁵Eddy Kiswanto, *Kondisi Sosiodemografis Penduduk Lansia Di Yogyakarta*, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta 2010), 35.

⁶Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Gunung Kidul Tahun, 2017, 5.

kasus. Tahun 2017 ini di prediksi akan lebih tinggi dari setidaknya tiga tahun terakhir, tahun 2014 ada 21 kasus, pada tahun 2015 terdapat 31 kasus, dan pada tahun 2016 terdapat 30 kasus. Sedangkan usia rata-rata korban bunuh diri terbanyak didominasi warga berumur 60-80 tahun.⁷ Kedua, berdasarkan suatu penelitian mengenai lansia penyandang demensia.⁸ Dibandingkan dengan empat kota atau kabupaten yang lain di DIY, kabupaten Gunung Kidul memiliki lansia penyandang demensia yang tertinggi mencapai 29,4% dibandingkan 20,1% rata-rata lansia penyandang demensia di wilayah yang lain.⁹

Komitmen pemerintah dalam hal ini sudah cukup memadai. Regulasi khusus sudah diterbitkan, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, Keputusan Presiden (KEP-PERS) Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional (KOMNAS) lansia, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pembentukan Komisi Daerah (KOMDA) lansia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lansia Daerah. Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan Lansia tahun 2003 dan diperbaharui tahun

⁷Gunung Kidul, *KedaulatanRakyat Jogja Kasus Bunuh Diri*, 11 September 2017.

⁸Demensia adalah suatu penyakit degeneratif dimana fungsi otak yang mengendalikan emosi, ingatan, pembuatan keputusan, prilaku dan fungsi otak lainnya semakin lama semakin berkurang.

⁹Roem Topatimasang, *Memanusikan Lanjut Usia: Penuaan Penduduk Dan Pembangunan Di Indonesia*, (Yogyakarta:Survey Meter,2013), 30.

2008 oleh Kementerian Sosial dan unsur-unsur lain yang terkait, selain itu, ada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.¹⁰

Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ramah lansia sebetulnya sudah dilakukan, misalnya dari Kementerian Sosial melaksanakan program pelayanan sosial panti atau non-panti, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), *Day Care* atau *Home Care*, Pelembagaan Pelayanan Sosial, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan diatas banyak program-program pelayanan bagi masyarakat lansia yang telah dilaksanakan di Indonesia. Namun demikian, realitas masyarakat lansia yang diukur berdasarkan indikator jumlah penuaan penduduk lansia yang kurang diperhatikan masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program kelansiaan belum berjalan dengan baik. Strategi-strategi dan upaya yang lebih tepat dalam menangani masalah lansia untuk mewujudkan masyarakat yang ramah lansia. Salah satu bentuk penanggulangan masyarakat lansia adalah dengan pemberdayaan. Pemberdayaan yang ada di masyarakat bertujuan agar mereka bisa mandiri dan sejahtera. Sebagai upaya konkretnya adalah melalui pelatihan dan berbagai usaha dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada untuk menjadikan masyarakat lansia lebih sejahtera.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) sudah membentuk KOMDA lansia sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 60 tahun 2008, selain melaksanakan program-program

¹⁰*Ibid.*

pemberdayaan masyarakat pelayanan administrasi publik, termasuk pos pembinaan terpadu yang sekarang mulai dibentuk. Kementerian Pekerjaan Umum mulai melaksanakan amanat UU Nomor 28 tahun 2004 tentang bangunan gedung dan aksesibilitas. Kementerian perhubungan melaksanakan program aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana serta edukasi transportasi umum untuk lansia.¹¹

Implementasi UU Nomor 13 Tahun 1998 dan UU serta peraturan lainnya masih terbatas. Sosialisasi berbagai ketentuan hukum tersebut, baik di kalangan pemerintah dan unsur masyarakat, masih belum optimal. fakta implementasi kebijakan lanjut usia dan tantangan yang di hadapi saat ini sesungguhnya belum mewujudkan ramah lansia. Walaupun pemerintah dalam hal ini telah berupaya mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, namun hal tersebut belum terealisasi secara penuh sampai tingkat bawah.

Tersirat bahwa sebenarnya ada keseriusan yang cukup dari pemerintah terhadap persoalan penduduk lansia (dan ini sebagai harapan bagi para lansia). Hanya saja pemerintah dan intitusi terkait, baik milik pemerintah sendiri maupun swasta; kurang berupaya optimal untuk dapat mewujudkannya. Berbagai kendala maupun hambatan yang muncul belum dilihat sebagai tantangan sehingga banyak lansia yang ‘terlantar’ di rumah anaknya tidak dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah. Pemerintah kurang pro-aktif dan hanya mengatakan mayoritas masyarakat (karena alas

¹¹*Ibid.*

an budaya merasa tidak etis untuk menitipkan orangtuanya di panti . padahal yang bertanggung jawab terhadap lansia yang tinggal bersama anaknya, tidak harus berarti mengambil dan menitipkannya di panti jompo banyak program yang bisa dirancang agar lansia dapat tetap tinggal di rumah anaknya tetapi juga tetap produktif dengan keterampilan yang dimiliki atau keterampilan baru yang diajarkan melalui program pemerintah. Lunturnya modal sosial dikalangan masyarakat maupun keluarga mengakibatkan sebagai alasan utama kurang optimalnya mewujudkan hak-hak dasar lansia.

FOPPERHAM (Forum Pendidikan Dan Perjuangan Hak Asasi Manusia), sebagai salah satu NGO/LSM lokal yang mengampu program peduli dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama setahun ini memulai menginisiatif rakyat untuk bergerak memberdayakan dirinya sendiri menyangkut isu lanjut usia ini. Merivitalisasi kembali modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia studi kasus di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul. Modal sosial yang dimaksud adalah modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari norma sosial yang menjadi perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah kesatuan dalam masyarakat atau kelompok keanggotaan bersama-sama, sehingga menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya terhadap aspek ekonomi, tetapi juga terhadap setiap aspek eksistensi sosial lainnya. Rakyat di akar rumput yang memiliki kedaulatan sendiri untuk bergerak adalah mereka yang berada di Desa Kedungkeris, Kecamatan Nglipar,

Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.¹² Desa Kedungkris yang terdiri dari tujuh dusun: Dusun Sendowo Lor, Sendowo Kidul, Pringsurat, Kedungkris, Kwarasan Kulon, Kwarasan Tengah, dan Kwarasan Wetan. Memiliki lansia sebanyak 644 orang, Kondisi lansia secara individu di Desa Kedungkris (1) mengalami penyakit degeneratif, (2) hidup sebatang kara, (3) mengalami kecacatan, (4) masih bekerja di ladang.¹³

Mengingat berbagai permasalahan tersebut, FOPPERHAM bersama pemerintahan Desa Kedungkris memulai upaya menjadikan/mendorong desa tersebut menjadi “Desa Ramah Lansia”. Mengacu parameter yang dibuat oleh WHO tahun 2002 untuk kota/kabupaten ramah lansia, setidaknya ada delapan acuan/parameter kerangka kerja untuk menuju ke arah sana: (1) gedung dan ruang terbuka, (2) transportasi, (3) perumahan, (4) partisipasi sosial, (5) penghormatan dan inklusi sosial, (6) partisipasi sipil dan pekerjaan, (7) komunikasi dan informasi, (8) dukungan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Desa Kedungkris juga telah memiliki relawan pendamping lansia yang terdiri dari ibu-ibu atau perempuan muda yang berjumlah 57 orang se-Desa Kedungkris. Relawan pendamping lansia Desa Kedungkris ini memiliki komitmen bersama dalam satu slogan, “*selangkah meraih berkah ngurusi simbah*’’.¹⁴ Komitmen ini mereka turunkan dalam agenda kegiatan bersama: (1) mengurus pertemuan rutin lansia setiap selapan (35 hari)

¹²Wawancara Dengan Astri Wulandari, Staf Bagian Pendidikan Fopperham, Pada Tanggal 25 Agustus 2018 Pukul 13:00-14:00 WIB.

¹³Data Ini Diperoleh Dari FGD Fopperham Dengan Kader Pendamping Lansia Desa Kedungkris, 26 Januari 2018.

¹⁴*Ibid.*

sekali di tiap-tiap dusun. (2) mengunjungi lansia (*home visit*) yang sudah tidak bisa beraktifitas (*bed rest*) dan mendatangi pertemuan lansia secara rutin tersebut. (3) menuliskan kegiatan-kegiatan tersebut dalam sebuah buku harian catatan pendamping lansia.

Menyadari bahwa masih banyaknya permasalahan lanjut usia terkait dengan revitalisasi.¹⁵ Modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia, studi kasus di lembaga FOPPERHAM di Desa Kedungkris Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk tesis dengan judul

“REVITALISASI MODAL SOSIAL SEBAGAI UPAYA ADVOKASI KEBIJAKAN LANSIA STUDI KASUS LEMBAGA FOPPERHAM DI DESA KEDUNGKERIS, NGLIPAR, KAB. GUNUNG KIDUL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul?

¹⁵Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan lain sebagainya.

2. Bagaimana capaian lembaga Fopperham dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Konsekuensi logis karya ilmiah dari sebuah produk keilmuan adalah terbuka untuk dilakukan kajian ulang secara kritis, baik untuk menyangkal atau menguatkannya. Ilmu akan berkembang dengan pesatnya apabila ada dialog dan saling menyangkal dalam pengertian bukan saling menafikan. Keadaan serta suasana keilmuan seperti inilah yang seharusnya dibangun karena sudah menjadi hukum alam yakni ketika keilmuan sudah mapan pada tahap tertentu akan mengalami sebuah anomali pula, dengan lahirnya berbagai pembaharuan. Demikian juga, ternyata sebuah metamorfosis keilmuan pada titik tertentu akan mengalami pula sebuah titik jenuh untuk kembali pada konsep awal.

Dengan demikian maka, dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana langkah dan strategi dari lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia studi kasus di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul.
2. Untuk mengetahui capaian lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia studi kasus di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul.

3. Sebagai bahan masukan bagi lembaga FOPPERHAM dalam meningkatkan advokasi kebijakan lansia sebagai upaya peningkatan kelompok usia lanjut yang mandiri.

D. Kajian Pustaka

Subtansi kajian pustaka adalah untuk menguatkan beberapa penemuan yang peneliti temukan, baik dari sisi teori, metodologi, pendekatan ataupun sisilain yang tak sama dengan penelitian terdahulu. Setelah mengadakan pengamatan dan penelusuran, penelitian mengenai strategi lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul, belum pernah dilakukan. Namun demikian, kajian-kajian mengenai lansia, kehidupan lansia, konsep diri pada lanjut usia, perilaku kehidupan lansia, kualitas hidup lansia, telah banyak dilakukan, adapun penelitian terdahulu dapat penulis sarikan dibawah ini diantaranya.

Pertama buku Jen Fauzan (2013), Dengan judul Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia, Kota Ramah Lanjut Usia 2030.¹⁶ Buku ini berisi tentang lanjut usia yang sehat dan aktif akan selalu menginginkan untuk tetap dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sesuai dengan pilihan masing-masing. Sebagai akibat dari proses degeneratif yang terjadi di usia senja, lanjut usia memerlukan dukungan lingkungan fisik, sosial, budaya, dan akses pelayanan kesehatan agar bisa tetap aktif. dukungan tidak merupakan bentuk kemandirian bagi lanjut usia, namun menunjang

¹⁶Jen Fauzan, 2013, *Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia, Kota Ramah Lanjut Usia 2030*. (Depok, Sleman, Yogyakarta, 2013).

lanjut usia agar senantiasa sehat, aktif, dan mandiri sehingga berdaya guna. Indonesia masih jauh dari kondisi lingkungan yang bisa dikatakan sebagai ramah lanjut usia. Inilah yang mendorong di lakukannya Studi Kota Ramah Lanjut Usia di 14 kota di Indonesia. Studi ini merupakan buah kerja sama dengan SurveyMeter dan *Center For Ageing Studies*, Universitas Indonesia yang didanai oleh *Knowledge Sector*, Australian Aid yang dikelola oleh *The Asia Foundation*. Hasil Studi memberikan gambaran keadaan kota-kota di Indonesia pada tahun 2013.

Kedua Artikel Trisnawati P. Samper, dengan judul “Hubungan Interaksi Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia Di BPLU Senja Cerah Provinsi Sulawesi Utara”.¹⁷ Masalah yang dikaji Oleh Trisna P. Samper Adalah : (1) Hubungan Interaksi Sosial dan Kualitas Hidup lansia di BPLU Senja Cerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan masalah tersebut, Trisna P. Samper berkesimpulan bahwa, jumlah responden dengan interaksi sosial baik terdapat 21 responden dimana 4 (12,5%) responden dengan kualitas hidup cukup, 16 (50,0%) responden kualitas hidup tinggi sedangkan responden dengan intraksi sosial cukup sebanyak 12 responden dimana 9(28,1%) responden kualitas hidup cukup dan 3 (9,4%) responden kualitas hidup tinggi dan didapat nilai Value $0,004 < 0,05$. Kesimpulan ini menunjukkan ada hubungan intraksi sosial dengan kualitas hidup lanjut usia.

¹⁷Trisna P. Samper, 2017, “*Hubungan Intraksi Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia Di BPLU Senja Cerah Provinsi Sulawesi Utara*”Jurnal, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara.

Ketiga Artikel Karina Megasari Winahyu, dengan judul “Hubungan Antara Persepsi Dukungan Sosial Dan Kualitas Hidup Lansia Dengan Hipertensi Di Kota Tangerang”.¹⁸ Masalah yang dikaji Karina Megasari Winahyu adalah: (1) mengidentifikasi hubungan antara dukungan sosial terhadap warga lanjut usia Di Kota Tangerang Banten, (2) kualitas hidup lanjut Usia dengan hipertensi Di Kota Tangerang Banten. Berdasarkan masalah tersebut, Karina Megasari Winahyu berkesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara persepsi dukungan sosial dengan kualitas hidup lansia dengan hipertensi di Kota Tangerang Banten. Rekomendasi hasil penelitian ini yaitu perlu ditingkatkannya sumber dukungan sosial dari keluarga, teman, dan orang penting lainnya agar lansia dengan hipertensi memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Keempat Artikel Ramadhani Bondan Puspitasari, dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kabupaten Sidoarjo”.¹⁹ Masalah yang dikaji oleh Ramadhani Bondan Puspitasari adalah : (1) mendeskripsikan peran pemerintah dalam pemberdayaan lansia di kabupaten sidoarjo, (2) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan lansia di kabupaten sidoarjo. Berdasarkan masalah tersebut, Ramadhani Bondan Puspitasari berkesimpulan bahwa, pemerintah kabupaten sidoarjo dalam menjalankan

¹⁸Karina Megasari Winahyu, 2017, “*Hubungan Antara Persepsi Dukungan Sosial Dan Kualitas Hidup Lansia Dengan Hipertensi Di Kota Tangerang*” Jurnal Ilmiah, Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangenrang, Banten.

¹⁹Ramadhani Bondan Puspitasari , 2015, “*Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kabupaten Sidoarjo*” Jurnal Ilmiah, Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo.

pemberdayaan lanjut usia cukup bagus. Hal tersebut didukung oleh adanya bimbingan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan berupa posyandu lansia dan senam lansia; pelatihan keterampilan berupa kerajinan tangan dari bahan daur ulang, kemudahan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, serta bantuan sosial berupa uang Rp. 300.000 bagi lansia kurang mampu dan sakit-sakitan. Sedangkan, beberapa faktor penghambat dalam pemberdayaan lansia antara lain pertama, belum adanya koordinasi di antara tiga SKPD yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Kedua, kurang validnya pendataan lansia di Kabupaten Sidoarjo di tingkat desa atau kelurahan. Ketiga, kurangnya kesadaran lansia tentang pentingnya pemberdayaan untuk kehidupan mereka.

Objek dan fokus penelitian Jen Fauzan, Trisnawati P. Samper, Karina Megasari Winahyu, Ramadhani Bondan Puspitasari berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penulis akan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Gunung Kidul studi kasus di Desa Kedungkris, kec. Nglipar, Gunung Kidul fokus pembahasan lebih kepada bagaimana strategi dari lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul. dan capaian dari lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul. Sebagaimana

diketahui penuaan penduduk kini sudah menjadi isu dunia. Di negara-negara sedang berkembang, isu ini memang belum terlalu banyak di bahas seperti di negara-negara maju. Namun, tidak berarti tidak penting untuk segera mulai di perbincangkan, karena isu ini berkaitan erat dengan berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang menentukan. Apalagi jika melihat fakta bahwa proporsi penduduk yang memasuki usia lanjut semakin lama semakin signifikan jumlahnya di banyak negara. Pencapaian keberhasilan dalam mengadvokasi kebijakan kota ramah lansia, memerlukan keterlibatan peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, lembaga, serta organisasi sosial untuk berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia.

E. Kerangka Teori

Teori advokasi lansia dan kebijakan publik merupakan kerangka teoritis untuk membahas strategi dan capaian yang dilakukan oleh FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul.

1. Advokasi dan Kebijakan Lansia

a. Advokasi

Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut, dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan. Advokasi sering dianggap sebagai salah satu

strategi yang ampuh untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Ada banyak definisi advokasi dan sering sekali definisi tersebut mempunyai arti yang berbeda tergantung perspektif yang digunakan. Advokasi bagi pengacara misalnya adalah mewakili individu atau sekelompok orang untuk pengacara di pengadilan. Ezzel mendefinisikan advokasi sebagai *“purposeful activities social workers undertake to change policies, practices, and condition on behalf of individuals or groups”* (serangkaian kegiatan yang terencana untuk mengubah kebijakan, praktek dan kondisi yang menindas yang dilakukan oleh pekerja sosial, mewakili individu atau sekelompok orang). Hal senada diungkapkan oleh Mansur Fakhri bahwa advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju.²⁰

Advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan sistem yang mendukung tujuan atau program tertentu. William N Dunn mengatakan advokasi adalah memperjuangkan hak individu, kelompok atau masyarakat, melindungi dari segala macam bentuk penindasan (eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, marginalisasi), menyelesaikan hambatan birokratis dalam pemberian layanan sosial, dan

²⁰Mansour Fakhri, 2000, *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi*, Edisi Ke-16, (Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta), 5-6.

memfasilitasi tersedianya akses terhadap sumberdaya, layanan dan peluang-peluang lain yang ada.²¹

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan yang terorganisir dan terencana melalui serangkaian kegiatan adalah sebuah keniscayaan. Mansur Fakih menjelaskan strategi advokasi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan diatas adalah.²²

- 1) Mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan seperti lobbi, negosiasi, mediasi dan kolaborasi
- 2) Melakukan pembelaan seperti *class action* dan legal standing
- 3) Mengajukan konsep tanding seperti seminar, legal drafting, *Counter draf* dan *judical review*

Dalam kondisi dunia yang saling terkait dan dinamis, advokasi penting terkait dengan kebijakan dan peraturan di negeri sendiri dan juga dampak dari peraturan dan kebijakan yang ada di negara lain yang harus segera disikapi oleh para pemangku kebijakan. Oleh karenanya, dimasa mendatang tidak ada organisasi ataupun asosiasi pemangku kebijakan yang dapat mengabaikan fungsi advokasi, karena advokasi adalah kunci bagi kelangsungan dan eksistensi sebuah asosiasi di masa depan. Advokasi kebijakan termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, penghapusan, penolakan ataupun perubahan

²¹Willian N Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 35-36.

²²Mansour Fakih, 2000, *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi*, Edisi Ke-16, (Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta), 20-25.

kebijakan yang ada. Oleh karenanya, advokasi kebijakan publik dapat berupa tindakan penentangan terhadap posisi pemerintah dalam isu-isu tertentu, khususnya dalam kebijakan publik yang menyangkut kegiatan Lanjut Usia, Organisasi masyarakat atau lembaga masyarakat yang konsen dalam pemenuhan kebutuhan sosial perlu membuat suaranya didengar sehingga dapat memperbaiki kebijakan publik yang perlu dirubah atau dibentuk.

Ada dua unsur penting untuk membangun konsep advokasi di luar batas pengertian advokasi sebagai proses litigasi dan perubahan kebijakan. Pertama, advokasi harus ditujukan untuk membela dan meringankan beban kelompok miskin dan pinggiran akibat salah urus negara, tujuan yang seharusnya berorientasi pada perubahan sosial (social transformation). Kedua, advokasi harus dapat dijadikan untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakat korban untuk menentukan orientasi, strategi dan merefleksi perubahan berbasis pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Dua unsur itu yang belum ada dalam konsep advokasi sebagai alat untuk mengubah kebijakan maupun advokasi sebagai proses pembelaan di pengadilan.²³

Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalam pembahasan ini tak lain adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kata lain, advokasi yang dirumuskan merupakan praktek

²³Teuku Zulyadi, Dosen Prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, *Advokasi Sosial*. Jurnal Al-Bayan / Vol. 21, No. 30, Juli-Desember 2014, 16.

perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik.

Melakukan advokasi berarti bertindak sebagai seorang perantara, penengah, atau pembela yang akan bertindak seperti penghubung antara masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak-pihak yang terkait. Hal ini dilakukan untuk membantu pemecahan masalah ataupun pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, dengan melakukan kontak dan berbagai pendekatan dengan berbagai instansi pemerintah di semua tindakan.

b. Prinsip-prinsip Advokasi

Tujuan advokasi adalah melakukan perubahan, maka akan selalu ada resistansi, oposisi dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Edi Suharto (2007) di dalam bukunya menjelaskan ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses. Prinsip tersebut adalah:

1) Realistis

Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur (*measurable*). Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas. Pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai (*achievable*) dalam kurun waktu tertentu (*time-bound*). Jangan buang energi dan waktu kita dengan pilihan yang tidak mungkin

dicapai. Gagasan kemenangan-kemenangan kecil namun konsisten. Sekecil apapun, keberhasilan senantiasa memberi motivasi.

2) Sistematis

Advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat. *“If we fail to plan, we plan to fail,”* artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Kemas informasi semenarik mungkin melibatkan media secara efektif proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.

3) Taktis

Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi atau sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya (*trust*). Sekutu terdiri dari sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat biasanya dinamakan lingkaran inti, yakni kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sekutu jauh adalah pihak-pihak lain yang mendukung kita, namun tidak terlibat dalam gerakan

advokasi secara langsung. Lingkaran inti biasanya disatukan atau bersatu atas dasar kesamaan visi dan ideologis.²⁴

c. Sosial Aging

Dalam membahas dan mengkaji lansia mengandung pengertian dan pemahaman bahwa akan menjadi tua sebagai suatu kepastian baik secara fisik maupun psikis. Adapun menurut Cumming dan Henry mengatakan bahwa proses menjadi tua ditentukan oleh dua arah. Disatu pihak orang menjadi tua semakin tidak terlibat secara emosional dengan dunia sekitar, sehingga individu semakin melepaskan diri dari berbagai ikatan. Sebaliknya, dipihak lain individu dilepaskan oleh kehidupan bersama pada waktu pensiun.²⁵ Kondisi tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia lansia. Manusia menjadi tua dengan mengalami pelepasan sehingga menjadi lebih bahagia dengan kebebasan yang diperoleh dan berbagai kewajibannya akan menjadi berkurang baik terhadap lingkungan sosial maupun terhadap kehidupan bersama. Lansia secara perlahan-lahan akan menarik diri dari pergaulan sekitar. Demikian pula pihak masyarakat juga menginginkan agar lansia menarik diri dari lingkungan sesamanya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial lansia berkurang baik kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian para lansia tentu akan kehilangan peran dalam kehidupan masyarakat.

²⁴Mansour Fakih, 2000, *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi*, Edisi Ke-16, (Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta), 2-3.

²⁵Haditono, *Psikologi Perkembangan. Pengantar Dalam Berbagai Perkembangannya*. (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2002), 123

d. Pengertian kebijakan publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sector seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu terlihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Dan Keputusan Bupati/Walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut pandang mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kapla juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno.²⁶ Mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

²⁶*Ibid.*

Robert Eystone sebagaimana dikutip Leo Agustino.²⁷ Mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu; 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Johan Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan.²⁸ menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip oleh Hesel Nogi Tangkilisan yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah

²⁷Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta, 2008), 18.

²⁸Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI 2003), 36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkeris melalui tiga tahap yaitu, tahap perencanaan sosial, aksi sosial dan peningkatan kesadaran dan pendidikan sosial. Tahap perencanaan sosial merupakan strategi yang dilakukan oleh lembaga FOPPERHAM. Tahap perencanaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan masyarakat di Desa Kendungkris tentang hak, kebutuhan dan potensi. Selanjutnya agar masyarakat memiliki suatu kesepahaman dalam memaknai lansia. dengan harapan terjadi penyadaran kepada warga seputar jiwa sosial atau kebersamaan, dan dapat mempengaruhi berfikir masyarakat terhadap persoalan-persoalan atau masalah-masalah kehidupan yang lainnya. sehingga dapat menekan pemerintah dalam setiap kebijakan dalam pembangunan yang harus memperhatikan kehidupan masyarakat supaya tidak mengejar keuntungan materi semata, tetapi memperhatikan keseimbangan kehidupan masyarakat dalam setiap pembangunan. Tahap Perencanaan ini di mulai dari kerjasama lembaga Fopperham dengan pemerintah Desa kedungkeris.

Kemudian menggali permasalahan dan potensi (*Assesment*) lansia di Desa Kedungkeris. Berikutnya melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan dengan Karang Taruna, PKK, Kader Posyandu Lansia, dan perwakilan lansia dari tujuh dusun di Desa Kedungkeris dalam rangka menemukan dan merumuskan langkah strategis dari perspektif masyarakat setempat. Tahap aksi sosialnya adalah adanya pertemuan rutin lansia yang dilaksanakan di Desa Kedungkeris, berkunjung kerumah lansia atau *Home Visit* ini merupakan kegiatan pelayanan berbasis komunitas dimana seorang petugas dari kader relawan lansia berkunjung kerumah lansia yang di gerakkan oleh FOPPERHAM untuk meninjau kesehatan lansia, pelayanan kesehatan terhadap lansia pelayanan Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fopperham di Desa Kedungkeris sejauh ini bekerjasama dengan Rumah Sehat Baznas Yogyakarta. Rumah Sehat Baznas Yogyakarta merupakan Lembaga di bawah naungan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang bergerak di bidang kesehatan. Lokasi Rumah Sehat Baznas sudah tersebar dibeberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Bantul, Yogyakarta. Adapun peningkatan kesadaran dan pendidikan sosial yang dilakukan oleh FOPPERHAM meliputi pelatihan dasar keterampilan mendengar dan menulis dan workshop Desa Kedungkeris

2. Capaian lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkeris adalah sebagai berikut: *Pertama* terbentuknya kerelawanan pendamping lansia di Desa Kedungkeris yang terdiri dari 67 ibu-ibu, *Kedua* terbentuknya pertemuan rutin lansia di tiap-tiap dusun Desa Kedungkeris, *Ketiga* terbentuknya Lembaga Kesejahteraan Sosial Desa Kedungkeris, *Keempat* terbentuknya Pekerja Sosial Masyarakat Desa Kedungkeris sebagai upaya mendorong alokasi dana Desa untuk lansia setiap tahunnya. Semua lansia terlayani, terpenuhi hak-hak lansianya dan tidak ada lagi yang terdiskriminasi.

B. Saran

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian terhadap Revitalisasi Modal Sosial sebagai Upaya Advokasi Kebijakan lansia di desa kedungkeris, maka dalam upaya pengembangan dan penelitian di bidang kajian selanjutnya, kiranya penulis perlu mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlunya penelitian yang lebih komperhensif dan kajian lebih lanjut tentang Revitalisasi Modal Sosial sebagai Upaya Advokasi Kebijakan lansia di desa kedungkeris serta perlu diteliti kembali mengenai Revitalisasi Modal Sosial sebagai Upaya Advokasi Kebijakan desa ramah lansia di Desa kedungkeris
2. Diharapkan masyarakat Desa lain di Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan

lainnya belajar dengan masyarakat Kedungkris dalam mengayomi lansia.

3. Agar pemerintah Desa Kedungkris terus mampu menjaga dan memeberikan pelayanan terhadap masyarakat lansia, menyediakan Desa yang ramah lansia, supaya masyarakat lansia memiliki akses atau wahana melakukan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Budi, Winarno. *Kebijakan Publik-Teori Dan Proses*. Jakarta:Media Presindo, 2007.
- Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Gunung Kidul Tahun. 2017.
- Data Monografi Desa Kedungkris Semester I Kec, Nglipar. Kabupaten Gunung Kidul.Yogyakarta 2018.
- Francis, Fukuyama. *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Harry, Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung:Humaniora Utama Press, 2010.
- Hesel Nogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI 2003.
- Irfan, Islamy. *Prinsip-Prinsip Prumusan Kebijakan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara,2009.
- Jen, Fauzan.*Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia, Kota Ramah Lanjut Usia 2030*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.
- Jhon, Field. *Social Capital*. Cet. Ke-2.Yogyakarta:Kreasi Wacana,2011.
- Kiswanto, Eddy. *Kondisi Sosio demografis Penduduk Lansia Di Yogyakarta*. Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Leo, Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mansour, Faki. *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi*, Cet. Ke-16. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2000.

- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Probususeno. *Materi Sarasehan Gelar Budaya Lansia Nasional*, 10 Oktober 2018.
- Proyeksi Penduduk Indonesia: *Indonesia Population Projection 2010-2030*. Jakarta: Balai Akasara, 2013.
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Solichin Abdul, Wahab. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Suharno. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Pres, 2009.
- Suharsimi, Arikuntu. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Topatimasang, Roem. *Memanusiakan Lanjut Usia: Penuaan Penduduk Dan Pembangunan Di Indonesia*. Yogyakarta: Survey Meter, 2013.
- Tri, Astuty. *Rangkuman Intisari Sosiologi*. Cet. Ke-2. Jakarta : Vicosta Publishing, 2015.
- Willian, Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

JURNAL

- Karina. "Hubungan Antara Persepsi Dukungan Sosial Dan Kualitas Hidup Lansia Dengan Hipertensi Di Kota Tangerang." *Jurnal Ilmiah, Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangenrang*. Banten, 2017.
- Kusumastuti. *Modal Sosial Dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Infrastruktur*. *Jurnal Sosiologi*. 2015.
- Ramadhani. "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Ilmiah, Ilmu Administrasi Negara FISIP*. Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo, 2015.

Teuku. "Advokasi Sosial." *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 21, No. 30, Juli-Desember 2014.

Trisna. "Hubungan Intraksi Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia Di BPLU Senja Cerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran*. Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, 2015.

WEB

Gunung Kidul. "Kedaulatan Rakyat Jogja Kasus Bunuh Diri." <http://krjogja.com/web/news/red/bunuh-diri>. Diakses tanggal 11 September 2018.

FOPPERHAM. "Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Fopperham 2018." www.blogspot-Fopperham yogyakarta.com. Diakses tanggal 11 September 2018.